

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

**Noni Daeni**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: daeni95@gmail.com

**ABSTRACT.** *This study aims to determine, obtain objective data and information regarding the Implementation of the Reading Culture Development Program in the Management of Libraries in the Archives and Regional Library of Sumedang Regency. In this case the researcher traced through the Policy Implementation Model. The method used in the preparation of this report is a qualitative method (naturalistic setting) with descriptive type. Determination of targets is taken by using purposive sampling technique where the object is implementing the policy with certain considerations. Samples used in this study were 5 people namely Head of Administration, Head of Planning, Management, Archive Storage, Head of Research and Development, Head of Planning, Management of Reference services, Functional Position Groups. Data collection techniques through literature study, field studies (Observation, In-depth interviews, Documentation) and Triangulation. While the data processing procedure is carried out by referring to the basic operation of quoting from the Miles and Huberman Model, cited by Sugiono (2005: 91). Based on the results of research and discussion, researchers found that the Implementation of the Reading Culture Development Program in the Management of the Sumedang District Library was still quite low. This can be seen from several obstacles. Obstacles to the Implementation of the Reading Culture Development Program in Library Management in the Sumedang District Archives and Library Offices are as follows: lack of public awareness about the importance of reading culture, conditions of facilities and infrastructure are still inadequate, such as incomplete books. Efforts to overcome these obstacles are: increasing apparatus resources in providing understanding to the public about the importance of the Reading Culture Program and providing adequate facilities in terms of book collections, places and locations that are of interest to the community. As well as increasing the quantity and quality of library facilities and infrastructure.*

**Keywords:** Program implementation

### PENDAHULUAN

Budaya baca merupakan persyaratan yang sangat penting yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warganegara apa-bila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Melalui budaya baca, mutu pendidikan dapat di tingkatkan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Jadi membaca merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kreatifitas dan dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di perlukan kreatifitas yang tinggi. Bila kita

tidak ingin menjadi konsumen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang di kembangkan oleh Negara-negara maju, maka kita harus melakukan usaha-usaha untuk mendorong masyarakat menjadikan membaca sebagai kebutuhan sehari-hari.

Minat baca atau gemar membaca sangat di tuntutan oleh semua pihak untuk di kembangkan. Pemerintah Republik Indonesia bahkan menganggapnya sebagai strategi mendasar yang sangat penting untuk membangun bangsa.

Kabupaten Sumedang yang merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Barat

minat baca di kabupaten Sumedang masih cukup rendah sampai pada maret 2016 jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang adalah 1.767 orang, dengan jumlah pengunjung sebanyak 7.592. sistem layanan yang di pergunakan masih terbatas yaitu sistem layanan terbuka, yaitu pengunjung yang langsung datang ke perpustakaan dan sistem layanan perpustakaan keliling yang tersebar di 30 titik layanan. Dalam konteks ini pada akhirnya pemerintah harus mampu menjamin pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, di mana termasuk di dalamnya ketersediaan buku berkualitas yang murah dan dapat di akses public secara mudah.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 mempunyai 10 program dan 37 kegiatan, program tersebut diantaranya seperti Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Perpustakaan di kabupaten Sumedang merupakan salah satu perpustakaan umum yang menyediakan berbagai jenis layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang heterogen. Salah satu alat komunikasi yang tidak hanya untuk akses dan memperoleh informasi muktahir, tetapi juga untuk memberikan akses pemakaian tentang segala ide (Whidarto,1995). Ide-ide tersebut bisa berupa pengetahuan, budaya, social, politik dan sebagainya.

Adapun permasalahan yang diajukan penulis sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015?
2. Adakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015?

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca Dalam Pengelolaan Perpustakaan Di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015.

### TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan.

Udoji (dalam Agustino, 2008:140) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sejalan dengan pendapat Udoji, Edward III (dalam Winarno, 2008:177) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan

adalah salah satu ta-hap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi ke-bijakan yang dipengaruhinya.

Ada enam variabel, menurut Metter dan Horn (Agustino, 2008:142-144), yaitu seba-gai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen pelaksana
4. Sikap/ kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudaya-an adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut (Ahmadi, 2007:58). Menurut Koentjraningrat (dalam Setiadi, 2008:26) kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, milik dari manusia dengan belajar. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta ma-syarakat. Sedangkan menurut Taiytor (dalam Setiadi, 2008:27), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, keper-cayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia seba-gai anggota masyarakat.

Bagian ini memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori yang diambil dari pus-taka yang mendukung penelitian, serta me-muat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Sumber pustaka yang dirujuk pada bagian ini harus dicantumkan dalam kalimat atau pernyataan yang diacu dan dalam Daftar Pustaka.

## METODE

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering di sebut metode naturalistic, karena penilaiannya di lakukan pada kondisi alamiah (natural seting),

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena di anggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang di hadapi dilapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2002 : 17) sebagai berikut.

Metode kualitatif ini digunakan ka-rena beberapa pertimbangan:

1. Dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajamanpengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sedangkan Sugiyono, (2013:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

Metode penelitian yang berlandas-kan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (seba-gai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai ins-trumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil peneli-tian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012:8-13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri pene-litian kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (*instrumen*)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dan dasar (*grounded theory*)

6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
8. Adanya “batas” yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah proses implementasi kebijakan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kata lain implementasi merupakan wujud nyata dari kebijakan yang telah diformulasikan dengan harapan dapat memperoleh hasil yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditetapkan harus dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat penerima kebijakan tersebut, dengan memberikan informasi komprehensif atau yang menyeluruh yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat sesuai dengan permasalahan, baik pada tingkat perumusan, penetapan, pelaksanaan dan sampai pada evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

Demikian pula Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan dari pemerintah pusat yang didalamnya sering mengalami hambatan berupa keterbatasan baik sumber daya material maupun sumber daya manusia, komunikasi antara pimpinan dan bawahan, dan sebagainya.

### 1. Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam

### Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015

Mengenai Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu, Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

### 2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015.

Kesimpulan mengenai Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu, isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi.

#### a. Isi Kebijakan

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan merasakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan.

Implementasi kebijakan gagal karena masalah utamanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang

akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

### b. Informasi Dukungan

Implementasi Kebijakan Publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

### c. Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksana kebijakan tersebut.

### d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan referensi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Tabel 1.

### Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang

Dimensi	Indikator	Deskripsi Hasil	Kesimpulan
Isi kebijakan	Pemahaman isi kebijakan	Kurangnya pemahaman isi kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dalam suatu program	Pemahaman pegawai yang kurang dapat mempengaruhi terhadap suatu program.
Informasi	Ketidakjelasan informasi	Ketidakjelasan pemberian informasi ke masyarakat mempengaruhi terhadap baik buruknya suatu program sehingga pegawai sebaik mungkin untuk memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat.	Ketidakjelasan pemberian informasi kepada masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan program tersebut
Dukungan	kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan	Dukungan pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi karena dukungan dari pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan suatu program kebijakan.	Dukungan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu program budaya baca dalam pengelolaan perpustakaan.
Pembagian potensi	adanya pembagian tugas yang jelas	Pembagian potensi kerja yang tidak jelas akan sangat mempengaruhi karena pembagian tugas/kerja yang tidak sesuai besar kemungkinan program tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.	Pembagian kerja yang tidak jelas akan mempengaruhi ketidak berhasilan suatu kebijakan program.

### 3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

#### a. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang

menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan

yang akan dilaksanakan. kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

#### **b. Informasi**

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Komunikasi dalam hal ini merupakan suatu factor penting yang mempengaruhi implementasi atau kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan hanya bisa didapat mulai dari komunikasi yang baik. Selain itu transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi harus dijaga dengan baik untuk meminimalisir gangguan komunikasi.

#### **c. Dukungan**

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ada beberapa factor yang

terlibat dalam hal ini pihak legislatif, kelompok-kelompok yang berkepentingan warga Negara, media masa harus dipastikan memberi dukungan yang baik sesuai dengan perannya masing-masing.

#### **d. Pembagian Potensi**

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Supaya pelaksana suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik maka pembagian potensi harus diperhatikan. Pembagian wewenang tugas yang sesuai dengan kompetensi atau ditandai dengan adanya pembatasan yang jelas.

**Tabel 2**  
**Kesimpulan Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan Daerah di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang**

Dimensi	Indikator	Deskripsi Hasil	Kesimpulan
Isi kebijakan	Pemahaman kebijakan	Isi 1. Memberikan pembinaan kepada setiap pegawai supaya para pegawai memahami isi kebijakan yang disampaikan. 2. Memberikan pembinaan-pembinaan kepada setiap pegawai dengan jelas.	Untuk mengatasi pemahaman isi kebijakan yaitu dengan cara memberikan pembinaan-pembinaan, memberikan informasi dengan jelas kepada masing-masing pegawai.
Informasi	Ketidakjelasan informasi	1. Menyampaikan informasi sejelas mungkin supaya dapat dipahami oleh masing-masing pegawai 2. Berkomunikasi secara efektif mengenai tujuan-tujuan yang harus dicapai.	Untuk mengatasi ketidakjelasan informasi yaitu dengan cara menjelaskan sejelas mungkin atau berulang-ulang.
Dukungan	Kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan	1. Memberikan pemahaman mengenai program budaya baca dalam pengelolaan perpustakaan 2. Memberikan penjelasan, manfaat dari program yang akan dilaksanakan.	Untuk mengatasi kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan yaitu dengan cara memberikan pemahaman serta manfaat dari program yang akan dijalankan
Pembagian potensi	Adanya pembagian potensi	1. Memberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan dari masing-masing pegawai. 2. Memberikan tufoksi ke masing-masing pegawai sesuai dengan kemampuannya masing-masing.	Untuk mengatasi pembagian tugas yang tidak jelas yaitu dengan cara disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pegawai.

## PENUTUP

Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan Di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang perlu dilakukan peningkatan karena masih cukup rendah, dan masih kurang dalam pengembangan budaya bacanya. Hambatan mengenai Implementasi kebijakan Program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan Di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang tidak begitu signifikan hanya sebatas keterbatasan waktu untuk mensosialisasikan program. Kondisi ini

tentunya hanya sarana dan prasarana yang harus lengkap serta secara kelembagaan harus memiliki personil yang memahami betul mengenai program tersebut. Adapun factor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan budaya baca dalam pengelolaan yaitu:

- a. Pemahaman isi kebijakan
- b. Ketidakjelasan informasi
- c. Kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan
- d. Pembagian tugas yang tidak jelas

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Selaku pelaksana kebijakan seharusnya dapat memberikan pemahaman serta mensosialisasikan program yang

maksimal serta pembinaan secara berulang-ulang agar dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman pelaksana tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Pemahaman isi kebijakan, yaitu dengan cara memberikan pemahaman atau pembinaan bagi setiap pegawai yang belum memahami isi kebijakan dari program budaya baca dan pengelolaan perpustakaan.
- b. Ketidakjelasan informasi, yaitu dengan melakukan komunikasi secara efektif, menjelaskan berulang-ulang mengenai informasi yang disampaikan.
- c. Kurangnya dukungan pelaksana kebijakan, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada setiap aparatur pegawai mengenai pentingnya program tersebut serta manfaat dari program tersebut untuk meningkatkan budaya baca yang tinggi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas.
- d. Pembagian tugas yang kurang jelas, yaitu dengan cara memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pegawai.

Pelaksanaan program Pengembangan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang masih cukup rendah hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang mempunyai kartu anggota Perpustakaan dari Januari 2016 sampai Maret 2016 hanya berjumlah 639 orang dengan jumlah pengunjung 2.357 orang. Serta kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan seperti buku-buku yang kurang lengkap, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya budaya membaca

Pada akhirnya peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Agar lebih ditingkatkan lagi dalam melaksanakan program pengembangan budaya baca dalam pengelolaan perpustakaan daerah yang ada di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sebaiknya bagi pegawai yang berada di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang lebih meningkatkan cara kerja dalam pengelolaan Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan serta melengkapi sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik serta meningkatkan Program Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan.
4. Lebih meningkatkan sumber daya aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Program Budaya Baca dalam Pengelolaan Perpustakaan, dan menyediakan fasilitas yang memadai dari segi koleksi buku, tempat maupun letak lokasi yang menarik minat masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun, (2009). *Teknologi Informasi*, Bandung: Alfabeta.
- Atmosudirjo, Prajudi, (1986). *Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badudu, J.S. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasibuan, Melayu, S, P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksoro.



- Handayani, Soewarno, (1996). *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Iskandar, Jusman (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Moleong, Lexy, J.(2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant.(2004). *Public Policy. Kebijakan public Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo.